

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi, Isbandi Rukminto, *Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan) Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Az, Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah (Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja dan Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995).
- Handoyo, B. Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015).
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- \_\_\_\_\_, *Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Kurniawan, Lutfi J dan Mustafa Lutfi, *Perihal Negara, Hukum, dan Kebijakan Publik (Perspektif Politik Kesejahteraan yang Berbasis Kearifan Lokal, Pro Society, dan Gender)*, (Malang: Setara Press, 2012).
- Lubis, Solly, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008).
- Muhtaj, Majda El, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009).
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015).
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. (Bandung: Nuansa, 2009).

Smart, Aqila, *Anak Cacat Bukan Kiamat*, (Yogyakarta: Katahati, 2014).

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga Kota Semarang.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang.

### C. Jurnal

- Astuti, Sari Wiji, "Reorientasi Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Kelautan di Daerah Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah: Mendukung Visi Negara Maritim di Daerah", Jurnal Selat, Vol. 3, No. 1, Edisi 5, Oktober 2015, hlm. 384.
- Basuki, Udiyo, "Perlindungan HAM Dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons With Disabilities*)", SOSIO-RELIGIA, Vol. 10, No. 1, Februari 2012, hlm. 27.
- Hanifah, Abu dan Nunung Undayah, "Kontribusi Organisasi Sosial Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Organisasi Sosial di Kota Palembang Sumatera Selatan)", Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No. 01, Tahun 2011, hlm. 86.
- Hardjanti, Dewi Krisna, "Kajian Yuridis Tentang Penyandang Disabilitas", Perspektif Hukum, Vol. 16, No. 1, Mei 2016, hlm. 4.
- Hartati, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Pertambangan Mineral dan Batubara" Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41, No. 4, Oktober 2012, hlm. 531.
- Muzaki, Ahmad, "Pengembangan Program Rehabilitasi Sosial Sebagai Upaya Peningkatan Kerja Penyandang Disabilitas di UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh di Pasuruan", J+PLUS UNESA, Vol. 4, No. 1, Tahun 2015, hlm. 2.
- Nurhayati, Siti, "Kesetaraan di Muka Umum Bagi Penyandang Disabilitas (Analisis Putusan Nomor 28/Pid. B/Pn. Skh/2013)", Realita, Vol. 14, No.1, Januari 2016, hlm. 96.
- Pawestri, Aprilina, "Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional", Era Hukum, Vol. 2, No. 1, Juni 2017, hlm. 176.
- Purnomosidi, Arie, "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia", Refleksi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 163.
- Rompis, Kartika Gabriela, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", Lex Administratum, Vol. IV, No. 2, Februari 2016, hlm. 171.
- Subechi, Imam, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 3, Nopember 2012, hlm. 343.

Tyesta, Lita, “Prospek Perlindungan Penyandang Disabilitas Terhadap Perilaku Diskriminatif di Kota Semarang”, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44, No. 3, Juli 2015, hlm. 255.

#### **D. Internet**

Galih Permadi, <http://jateng.tribunnews.com/2017/09/20/kartu-difabel-kota-semarang-belum-optimal-ini-dia-permasalahannya?page=2>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2017.

Alexander Devanda Wisnu P, <https://www.solider.id/baca/4065-merangkul-organisasi-difabel-semarang-pembentukan-hmiks>, diakses pada tanggal 30 Januari 2018.

Tri Wuryani, <https://metrosemarang.com/56138-56138>, diakses pada tanggal 30 Januari 2018.

#### **E. Buku Tahunan**

Badan Pusat Statistik Kota Semarang, Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2016 (Semarang:2016)

## **LAMPIRAN**